

PERUBAHAN RENJA 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BAUBAU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan karunia-Nya lah Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, selanjutnya Perubahan Renja SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Renja ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Perubahan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau Tahun 2024 ini disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten.

Baubau, 22 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Baubau



ABDUL RAHMAN, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730121 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
BAB.IV PENUTUP	23

Lampiran-Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau Berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2024. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Baubau Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Baubau Tahun 2024 menjabarkan tujuan dan sasaran strategi kebijakan serta arah pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Baubau sudah harus mempertimbangkan seluruh potensi dan permasalahan yang ada, terutama pada aspek

yang bersifat khusus dan mendesak. Untuk itu, penetapan pencapaian target kinerja program dan kegiatan harus jelas dan terukur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Baubau tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Baubau;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
-

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau tahun 2021 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 1);
 18. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 47 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau
-

19. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 34 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau;
20. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 62 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 62);
21. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 105 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 105);
22. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Baubau adalah sebagai berikut :

Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan di Kota Baubau yang dibiayai dari sumber dana APBD Kota Baubau.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Baubau yaitu sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024;
3. Sebagai acuan untuk merencanakan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Baubau Tahun 2024;
4. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Baubau Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Baubau Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan sampai dengan Triwulan II Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta rencana anggaran yang dibutuhkan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini, analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi perangkat daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja pada tahun berjalan (Triwulan II) pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2024, dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk evaluasi pogram dan kegiatan Perubahan Tahun 2024. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau pada Tahun 2024 sampai Bulan Juni (Triwulan II) melaksanakan 7 program 20 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Program Kegiatan/Sub Kegiatan, Target
Sampai Dengan Bulan Juni (Triwulan II) Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan /Sub. Kegiatan
		Target
1	2	3
A	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	25%
1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	43 Organisasi

B	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,034%
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan
C	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	60%
1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen
3	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Layanan
D	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	69%
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
E	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PUHA)	75%

1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Organisasi
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
F	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100%
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%
	Penguatan Kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak, dan DRPPA	6 Kegiatan
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	120 Orang
G	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang / Bulan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Dokumen
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Baubau tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tingkat Capaian indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60,23 Nilai
	Meningkatnya kondisi pembangunan yang berpihak pada anak	Persentase Nilai Capaian 5 (lima) Konvensi Hak Anak (Kelangsungan Hidup, Perlindungan, Tumbuh Kembang, Partisipasi dan Identitas)	69,4 %
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,92 Nilai

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau sampai dengan Bulan Juni (Triwulan II) Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut terlampir:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau melaksanakan 7 program 17 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Tingkat Capaian indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target yang ditetapkan sebanyak 60,23 atau sebesar 60,23 jika dibandingkan dengan target diakhir tahun perencanaan.
2. Persentase Nilai Capaian 5 (lima) Konvensi Hak Anak (Kelangsungan Hidup, Perlindungan, Tumbuh Kembang, Partisipasi dan Identitas)
Target yang ditetapkan sebanyak 69,4 % atau sebesar 69,4 % jika dibandingkan dengan target diakhir tahun perencanaan.
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Target yang ditetapkan sebanyak 72,92 Nilai atau sebesar 72,92 Nilai jika dibandingkan dengan target diakhir tahun perencanaan.

Analisis capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat di lihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel. 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target RPD			Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			B Nilai	B Nilai	B Nilai	-	B Nilai	
2	Tingkat Capaian indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			60,23 Nilai	64,44 Nilai	68,95 Nilai	-	60,23 Nilai	
3	Skor Kota Layak Anak (KLA)			450 Skor	500 Skor	600 Skor	-	450 Skor	
4	Persentase Nilai Capaian 5 (lima) Konvensi Hak Anak (Kelangsungan Hidup, Perlindungan, Tumbuh Kembang, Partisipasi dan Identitas)			69,4 %	69,8 %	70 %	-	69,4 %	
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			90,99 Nilai	91,2 Nilai	91,31 Nilai	-	90,99 Nilai	
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			72,92 Nilai	73,12 Nilai	73,32 Nilai	-	72,92 Nilai	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung adanya :

- a. Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pengendalian penyelenggaraan kebijakan di bidang perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Pejabat Wali Kota Baubau;

Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dalam fungsinya kepada Pejabat Wali Kota Baubau, Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DPPP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan :
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Baubau.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender :
 - 1) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 2) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 4) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 5) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan :
- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak :
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang diperlakukan tidak wajar (seperti perlakuan bullying/perundungan baik di sekolah maupun di lingkungan sosial lainnya)
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime, doxing, negative spam, pelecehan visual, pelecehan verbal atau akun palsu.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak :
- 1) Belum dipahaminya Pola Asuh Ideal untuk Anak oleh para orangtua;
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 3) Belum optimalnya pemanfaatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam melakukan upaya preventif dan promotif terkait isu ketahanan keluarga;
 - 4) Belum dipahaminya Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak oleh para pemangku kepentingan;
 - 5) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 6) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
 - 7) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita, termasuk Stunting
 - 8) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh

- di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
- 9) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 10) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 11) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih belum optimal.
 - 3) Belum optimalnya peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan karena masih terbatasnya pemahaman akan peranan fungsi PATBM sebagai upaya memberikan perlindungan optimal bagi anak;

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional seperti SPM dan MDG's. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah pada pencapaian visi misi kepala daerah.

Upaya Tindak Lanjut dari Permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau di masa yang akan datang. Tantangan yang dihadapi Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau dalam jangka waktu 3 tahun mendatang adalah :

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
3. Memperkuat peran dan fungsi UPTD PPA dan PUSPAGA sebagai layanan langsung yang disiapkan bagi masyarakat yang mengalami kendala terkait pola pengasuhan ideal bagi anak (PUSPAGA) sebagai upaya promotif preventif menekan angka kekerasan terhadap anak. Serta, pemanfaatan layanan UPTD PPA sebagai upaya

- rehabilitative dan kuratif penanganan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak;
4. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
 5. Mengoptimalkan peran dan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada level kelurahan sebagai upaya nyata seluruh pemangku kepentingan bagi terciptanya perlindungan anak;
 6. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
 7. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender.
 8. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
 9. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
 10. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
 11. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 12. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 13. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 14. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial.
 15. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.

16. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
17. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
18. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Agenda prioritas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah membangun komitmen bersama terhadap upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perempuan dalam menghapuskan kendala-kendala yang menghalangi terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, untuk melaksanakan hal tersebut maka diperlukan adanya strategi penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender adalah strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan.

Dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada Undang - Undang (UU) Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera. Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa).

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut diatas, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam perencanaan Perubahan Renja (Rencana Kerja) OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan/sub kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan kabupaten /kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga

Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Kewenangan kabupaten/Kota

VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PUHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

VII. PRORAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah untuk mewujudkan

kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak dan DRPPA

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota

Adapun Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1 berikut, terlampir :

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kota Baubau, selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kota Baubau. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Tahun 2024, tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau, disusun dalam rangka perwujudan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya, Serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan Rencana Kerja Perubahan dimasa mendatang.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien serta berjalan secara sistematis.

Baubau, 22 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Baubau



ABDUL RAHMAN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730121 200003 1 004

LAMPIRAN

EVALUASI TERHADAP RKPD TAHUN 2024 TRIWULAN II

Dinas / Badan : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target RPD Kota Baubau pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPD Kota Baubau sampai dengan RKPD Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Baubau Tahun 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Baubau Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kota Baubau s/d 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kota Baubau s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV				13			14 = 7+13		15 = 14/6X100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13%	13%	33%	34%			46%	47%									
2	08		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		100%	16,512,719,173	100%	5,139,048,100	13%	649,580,791	33%	1,754,414,460			46%	2,403,995,251	46%	2,403,995,251	46%	15%				
	2	08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Rata-Rata hasil ketercapaian pelaksanaan program Pendukung OPD	100%	10,468,200,000	0%	0	100%	3,429,895,320	31%	564,331,891	50%	1,040,381,266	81%	1,604,713,157	81%	1,604,713,157	81%	15%				
	2	08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	236,500,000	0	0	100%	41,768,620	14%	6,009,200	14%	6,000,000	29%	12,009,200	29%	12,009,200	29%	5%				
	2	08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	73,000,000		1	Dokumen	6,000,000	0	Dokumen	1	Dokumen	6,000,000	0	Dokumen	6,000,000	0%	8%	DP3A			
	2	08 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	27,000,000		1	Dokumen	5,999,000	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0%	0%	DP3A			
	2	08 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	24,500,000		1	Dokumen	6,000,000	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0%	0%	DP3A			
	2	08 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	27,000,000		1	Dokumen	6,000,000	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0%	0%	DP3A			
	2	08 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	24,500,000		1	Dokumen	6,000,000	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0%	0%	DP3A			
	2	08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	36,000,000		1	Laporan	6,009,200	1	Laporan	6,009,200	0	Dokumen	1	Laporan	6,009,200	33%	17%	DP3A			
	2	08 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	24,500,000		1	Laporan	5,760,420	0	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0%	0%	DP3A			
	2	08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8,590,000,000	0	0	100%	2,885,376,000	69%	509,526,983	67%	931,671,535	136%	1,441,198,518	136%	1,441,198,518	136%	17%				
	2	08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/Bulan	8,380,000,000		28	Orang/ Bulan	2,827,610,000	28	Orang/ Bulan	500,118,643	28	Orang/ Bulan	1,425,340,178	28	Orang/ Bulan	1,425,340,178	28%	17%	DP3A		
	2	08 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN	3 Dokumen	165,000,000		1	Dokumen	44,472,000	1	Dokumen	8,700,000	1	Dokumen	15,150,000	1	Dokumen	15,150,000	33%	9%	DP3A		
	2	08 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	36 Laporan	45,000,000		12	Laporan	13,294,000	1	Laporan	708,340	0	Laporan	708,340	1	Laporan	708,340	3%	2%	DP3A		
	2	08 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	58,500,000	0	0	100%	15,369,800	0%	0	50%	1,360,000	50%	1,360,000	50%	1,360,000	50%	2%				
	2	08 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	25,500,000		1	Dokumen	6,499,500	0	Dokumen	1	Dokumen	1,360,000	1	Dokumen	1,360,000	0%	5%	DP3A			

		2	08	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan sesuai standar Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	164,639,000	0	0	100%	58,140,000	0%		0.00%	0			0%	0	0%	0	0%	0	0%		
		2	08	07	2.03	06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang dilatih dan mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	300 Orang	164,639,000		120 Orang	58,140,000	0 Orang		0 Orang					0 Orang	0	0 Orang	0	0%	0	0%	DP3A

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPDP berikutnya:

Tabel 3.1

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BAU BAU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																			4.763.162.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.313.882.000,00	5.139.048.100,00	5.026.498.080,00	712.616.080,00							4.763.162.000,00			
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							4.313.882.000,00	5.139.048.100,00	5.026.498.080,00	712.616.080,00							4.763.162.000,00			
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Urusan				100 %	100 %	3.368.185.900,00	3.429.895.320,00	3.367.439.300,00	85.976.100,00							3.454.162.000,00			
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	42.008.200,00	41.768.620,00	36.208.600,00	-5.799.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau		45.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM		6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.999.000,00	5.999.000,00	5.211.000,00	-788.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM		6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	4.954.000,00	-1.046.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM		6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	4.770.200,00	-1.229.800,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM		6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	4.760.000,00	-1.240.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM		6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.009.200,00	6.009.200,00	6.009.200,00	0,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM		6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	5.760.420,00	4.504.200,00	-1.495.800,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM		6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)				100 %	100 %	2.821.648.000,00	2.885.376.000,00	2.885.376.000,00	63.728.000,00			-	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau	2.894.952.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.763.882.000,00	2.827.610.000,00	2.827.610.000,00	63.728.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM		2.835.452.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	44.472.000,00	44.472.000,00	44.472.000,00	0,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.294.000,00	13.294.000,00	13.294.000,00	0,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM		14.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)				100 %	100 %	15.369.800,00	15.369.800,00	6.499.500,00	-8.870.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau	15.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.499.500,00	6.499.500,00	6.499.500,00	0,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			6.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.870.300,00	8.870.300,00	0,00	-8.870.300,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)				100 %	100 %	256.243.500,00	254.464.500,00	218.622.500,00	-37.621.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau		260.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.546.000,00	6.546.000,00	6.546.000,00	0,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.312.500,00	27.533.500,00	23.107.500,00	-6.205.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			29.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.901.000,00	11.901.000,00	11.901.000,00	0,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			12.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	6.900.000,00	-1.500.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	21.982.000,00	21.982.000,00	17.620.000,00	-4.362.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	17 Laporan	178.102.000,00	178.102.000,00	152.548.000,00	-25.554.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)				100 %	100 %	94.910.400,00	94.910.400,00	87.726.700,00	-7.183.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau		97.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.944.000,00	1.944.000,00	1.368.000,00	-576.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			1.960.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	50.399.700,00	50.399.700,00	50.399.700,00	0,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			8.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	4 Laporan	34.066.700,00	34.066.700,00	27.459.000,00	-6.607.700,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			34.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)				100 %	100 %	138.006.000,00	138.006.000,00	133.006.000,00	-5.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau		139.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	83.920.000,00	83.920.000,00	78.920.000,00	-5.000.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			84.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.430.000,00	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	46.656.000,00	46.656.000,00	46.656.000,00	0,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			47.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				25 %	25 %	17.002.300,00	112.726.800,00	112.726.800,00	497.700,00							17.500.000,00		
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya				100 %	100 %	17.002.300,00	112.726.800,00	112.726.800,00	95.724.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	Organisasi Perempuan Kota Baubau		17.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																			
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				43 Organisasi	43 Organisasi	17.002.300,00	112.726.800,00	112.726.800,00	95.724.500,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			17.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-				-	-	158.080.000,00	435.316.000,00	435.316.000,00	287.420.000,00							445.500.000,00		
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	85.500.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00			-	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			86.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	3 Dokumen	0,00	85.500.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			86.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota				100 %	100 %	158.080.000,00	349.816.000,00	349.816.000,00	191.736.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	Perempuan yang mengalami Kasus Kekerasan (KDRT)		359.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				17 Orang	17 Orang	158.080.000,00	151.456.000,00	151.456.000,00	-6.624.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			160.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	20 Layanan	0,00	198.360.000,00	198.360.000,00	198.360.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			199.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan				60 %	60 %	137.776.500,00	499.342.680,00	473.058.680,00	223.500,00							138.000.000,00		
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani				100 %	100 %	51.698.500,00	35.102.080,00	35.102.080,00	-16.596.420,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	Masyarakat Kelurahan		52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	51.698.500,00	35.102.080,00	35.102.080,00	-16.596.420,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Keluarga yang mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan				100 %	100 %	1.108.000,00	379.986.600,00	353.702.600,00	352.594.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	Organisasi Kemasyarakatan dan TP PKK Kota Baubau		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1.108.000,00	379.986.600,00	353.702.600,00	352.594.600,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPGA) sesuai Standar				100 %	100 %	84.970.000,00	84.254.000,00	84.254.000,00	-716.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)		86.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Layanan	1 Layanan	84.970.000,00	84.254.000,00	84.254.000,00	-716.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			86.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender dan anak				69 %	69 %	170.980.000,00	151.488.000,00	132.004.000,00	5.020.000,00							176.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data				100 %	100 %	170.980.000,00	151.488.000,00	132.004.000,00	-38.976.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		176.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	70.980.000,00	64.008.000,00	52.024.000,00	-18.956.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			71.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	87.480.000,00	79.980.000,00	-20.020.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak sesuai standar				75 %	75 %	228.655.100,00	223.475.100,00	219.259.100,00	2.344.900,00							231.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang melaksanakan PHA				65 %	65 %	148.097.000,00	143.951.000,00	143.951.000,00	-4.146.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	Lembaga Pemerintah, Instansi Vertikal, Non Pemerintah dan Dunia Usaha		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				100 Organisasi	100 Organisasi	148.097.000,00	143.951.000,00	143.951.000,00	-4.146.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak sesuai standar Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	80.558.100,00	79.524.100,00	75.308.100,00	-5.250.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	Layanan Kualitas Hidup Anak		81.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	80.558.100,00	79.524.100,00	75.308.100,00	-5.250.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			81.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota				100 %	100 %	233.202.200,00	286.804.200,00	286.694.200,00	67.797.800,00							301.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)				100 %	100 %	233.202.200,00	228.664.200,00	228.554.200,00	-4.648.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Satuan Pendidikan		242.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KA terpadu				6 Kegiatan	6 Kegiatan	233.202.200,00	228.664.200,00	228.554.200,00	-4.648.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			242.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	58.140.000,00	58.140.000,00	58.140.000,00			-	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			59.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	120 Orang	0,00	58.140.000,00	58.140.000,00	58.140.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Batulo	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM 2. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM			59.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
J U M L A H									4.313.882.000,00	5.139.048.100,00	5.026.498.080,00	712.616.080,00							4.763.162.000,00	